

Masalah untuk Konsultasi Tahap 3

Pendahuluan CODE

Pada tanggal 1 Juli 2015, the Komite Keefektifan Pembangunan (*Committee on Development Effectiveness/CODE*) membahas draf kedua dari *Tinjauan dan Pembaruan Kebijakan Perlindungan Bank Dunia - Usulan Kerangka Sosial dan Lingkungan (Draf ke Dua)*. Komite ini secara luas menyetujui susunan dan banyak bidang dari usulan Kerangka Sosial dan Lingkungan (*Environmental and Social Framework/ESF*). Namun tampaknya perlu ada diskusi lebih lanjut mengenai berbagai aspek-terutama pernyataan mengenai Visi, beberapa Standar, dan kepekaan/ambisi bahasa. Selain itu, perlu ada kejelasan lebih lanjut mengenai kemampuan penerapan dan kemungkinan dampaknya atas peminjam. Komite ini sepakat bahwa penting untuk menaljutkan upaya yang berpandangan ke depan guna memastikan keseimbangan ESF, menghindari beban pelaksanaan dan biaya yang terlalu besar atas peminjam, memperkuat kemampuan klien, mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, dan berperan pada kedua tujuan lembaga ini.

Komite ini menyetujui bahwa Manajemen harus memulai tahap ke tiga konsultasi mengenai revisi draf ke dua. Fokus konsultasi harus tertuju pada pengumpulan umpan balik dan pada kemampuan penerapan ESF di negara-negara peminjam; dan paket konsultasi harus mencakup daftar masalah yang bersifat indikatif berikut ini, namun tidak lengkap, yang harus ditelusuri lebih jauh selama konsultasi.

Komite ini menantikan kelanjutan keterlibatan mengenai ESF.

Masalah untuk Konsultasi Tahap 3

Dalam pertemuan tanggal 1 Juli 2015, *Committee on Development Effectiveness* (CODE) mendukung sesi konsultasi berikutnya mengenai draf ke dua dari Environmental and Social Framework (ESF). Direktur Eksekutif meminta Manajemen Bank Dunia agar membahas sejumlah hal dalam konsultasi Tahap 3. Daftar di bawah ini dibuat setelah pertemuan CODE, dan menetapkan hal-hal tertentu di mana Direktur Eksekutif meminta manajemen untuk menyertakan hal-hal tersebut dalam rapat konsultasi yang akan datang, terutama rapat yang akan dilakukan dengan pemerintah. Konsultasi itu akan berfokus pada pengumpulan umpan balik dari negara-negara peminjam dan para pemangku kepentingan lainnya mengenai masalah ini maupun masalah lain mengenai sumber daya dan pelaksanaan ESF. Daftar ini adalah indikasi masalah yang akan dibahas, tapi tidak lengkap. Manajemen akan bekerja sama dengan erat bersama Direktur Eksekutif untuk menyelenggarakan konsultasi-konsultasi tersebut, dan selalu memberi informasi terbaru kepada mereka mengenai kemajuan konsultasi. Setelah konsultasi berakhir, Manajemen akan mempersiapkan laporan mengenai masalah yang diangkat dalam konsultasi untuk ditinjau oleh Direktur Eksekutif.

| ESF | Masalah | Hal |
|--------------|---|---|
| Visi | Hak asasi Manusia | <ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan terhadap hak asasi manusia dalam ESF |
| ESP/ ESS1 | Kelompok non diskriminasi dan kelompok rentan | <ul style="list-style-type: none"> • Daftar eksplisit berisi kelompok rentan tertentu berdasarkan jenis/nama (usia, jenis kelamin, suku, agama, fisik, mental atau keadaan cacat lainnya, status sosial, status kewarganegaraan atau status kesehatan, orientasi seksual, identitas gender, kemiskinan atau status penduduk asli, dan/atau ketergantungan pada sumber daya alam yang unik) • Aspek-aspek tertentu dari prinsip non diskriminasi dalam konteks sosial dan politik yang kompleks, termasuk di mana pengakuan kelompok tertentu tidak sesuai dengan hukum nasional |
| | Penggunaan Kerangka Sosial dan Lingkungan Milik Peminjam | <ul style="list-style-type: none"> • Peranan kerangka Peminjam dalam pengelolaan dan penilaian risiko maupun dampak lingkungan dan sosial (E&S) di mana semua ini akan membuat proyek dapat mencapai tujuan yang secara materi sejalan dengan Standar Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Standards/ESS</i>) • Pendekatan untuk membuat keputusan tentang penggunaan kerangka Peminjam, termasuk metodologi untuk menilai di mana kerangka kerja akan membuat proyek mampu mencapai tujuan yang secara materi sejalan dengan ESS, dan pelaksanaan kebijakan Bank • Peranan kerangka Peminjam dalam proyek-proyek berisiko tinggi dan berisiko besar |
| | Pendanaan bersama/pendekatan umum | <ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan tentang standar E&S dalam situasi pendanaan bersama di mana standar rekanan pemberi dana tidak sama dengan standar Bank |
| | Manajemen risiko yang bersifat adaptif | <ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan terhadap pemantauan kepatuhan E&S dan perubahan proyek selama pelaksanaan |
| | Klasifikasi risiko | <ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan untuk menentukan dan mengkaji tingkat risiko proyek |
| ESS1 | Penilaian dan manajemen risiko maupun dampak lingkungan dan | <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian dan sifat dampak kumulatif maupun dampak tidak langsung yang harus diperhitungkan • Peperlakukan terhadap dampak kumulatif dan dampak tidak langsung bila diidentifikasi dalam penilaian proyek |

| | | |
|------|--|--|
| | sosial | <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan batasan proyek dan penerapan ESS pada Fasilitas Terkait (<i>Associated Facilities</i>), kontraktor, pemasok utama, sub proyek FI dan sub proyek yang didanai langsung • Keadaan di mana Bank akan menentukan apakah Peminjam harus tetap mempekerjakan pihak ke tiga yang independen |
| | Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Commitment Plan/ESCP</i>) | <ul style="list-style-type: none"> • Prinsip hukum ESCP dan implikasi perubahan ESCP sebagai bagian dari perjanjian hukum |
| ESS2 | Tenaga kerja dan kondisi kerja | <ul style="list-style-type: none"> • Definisi dan kebutuhan serta persyaratan untuk menangani tenaga kerja yang dipekerjakan oleh pihak ke tiga tertentu (broker, agen dan perantara) • Dampak penerapan dan pelaksanaan persyaratan tenaga kerja tertentu untuk kontraktor, pekerja dalam masyarakat dan pekerja sukarela serta pemasok utama • Kendala dalam menyediakan mekanisme penyampaian keluhan untuk semua pekerja proyek • Mengacu pada hukum nasional dengan tujuan mendukung kebebasan berserikat dan perundingan bersama • Penerapan mekanisme alternatif yang berkaitan dengan kebebasan berserikat dan berunding bersama bila hukum nasional tidak mengakui hak-hak tersebut • Masalah dalam penerapan ketentuan/standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (<i>Occupational Health and Safety/OHS</i>) |
| ESS3 | Perubahan iklim dan emisi GRK | <ul style="list-style-type: none"> • Hubungan antara ketentuan mengenai perubahan iklim dalam ESF dan komitmen perubahan iklim yang lebih luas, khususnya UNFCCC • Usulan pendekatan untuk mengukur dan memantau emisi gas rumah kaca (GRK) dalam proyek-proyek Bank dan implikasi daripadanya, sejalan dengan standar yang diusulkan, termasuk menentukan ruang lingkup, batasan, durasi, frekuensi dan kelayakan ekonomi maupun kelayakan keuangan dari perkiraan dan pemantauan tersebut • Implikasi yang diharuskan agar Peminjam memperkirakan dan mengurangi emisi GRK untuk proyek-proyek Bank, sesuai dengan standar yang diusulkan |
| ESS5 | Pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara paksa | <ul style="list-style-type: none"> • Perlakuan dan hak-hak penghuni tidak resmi dan pendekatan terhadap penggusuran paksa dalam situasi yang tidak terkait dengan pembebasan lahan • Penafsiran konsep pemukiman kembali sebagai "kesempatan pembangunan" dalam situasi proyek yang berbeda |
| ESS6 | Keanekaragaman hayati | <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan ketentuan mengenai pemasok utama dan layanan ekosistem, terutama dalam situasi dengan kapasitas rendah • Peranan hukum nasional yang berkaitan dengan melindungi dan melestarikan habitat alam dan habitat kritis • Kriteria untuk penyeimbangan keanekaragaman hayati, termasuk pertimbangan manfaat proyek |

| | | |
|-------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Definisi dan penerapan keuntungan bersih untuk keanekaragaman hayati |
| ESS7 | Penduduk Asli | <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Standar Penduduk Asli dalam konteks politik dan budaya yang kompleks • Pelaksanaan ESS7 di negara-negara di mana konstitusi tidak mengakui Penduduk Asli atau hanya mengakui kelompok tertentu sebagai penduduk asli • Kemungkinan pendekatan untuk mencerminkan istilah alternatif yang digunakan di berbagai negara dalam menggambarkan Pendudukan Asli • Keadaan (misalnya kriteria dan waktu) di mana pengabaian dapat dipertimbangkan dan informasi harus disampaikan kepada Dewan untuk menginformasikan keputusannya • Kriteria untuk menetapkan dan pelaksanaan Izin Sebelumnya yang Bebas dan Berdasarkan Informasi (<i>Free, Prior and Informed Consent/FPIC</i>) • Perbandingan antara usulan FPIC dan persyaratan yang ada mengenai konsultasi • Penerapan FPIC pada dampak terhadap warisan budaya Penduduk Asli |
| ESS8 | Warisan Budaya | <ul style="list-style-type: none"> • Perlakuan terhadap warisan budaya tak berwujud • Penerapan warisan budaya tak berwujud bila suatu proyek bermaksud mengkomersialkan warisan tersebut • Penerapan persyaratan warisan budaya bila warisan budaya belum dilindungi secara hukum atau yang sebelumnya telah diidentifikasi atau terganggu |
| ESS9 | Lembaga Perantara keuangan | <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan standar bagi sub proyek FI dan implikasi sumber dayanya, tergantung pada risiko yang ada • Harmonisasi pendekatan dengan IFC dan Equator Bank |
| ESS10 | Keterlibatan pemangku kepentingan | <ul style="list-style-type: none"> • Definisi dan identifikasi pemangku kepentingan proyek dan sifat keterlibatannya • Peran negara-negara peminjam atau badan pelaksana dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan proyek |
| Umum | EHSG dan GIIP | <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (<i>Environmental, Health and Safety Guidelines/EHSG</i>) dan Praktik Industri Internasional yang Baik (<i>Good International Industry Practice/GIIP</i>), terutama bila berbeda dengan hukum nasional atau bila mana Peminjam memiliki kendala teknis atau keuangan dan/atau mengingat keadaan tertentu suatu proyek |
| | Kelayakan dan sumber daya untuk pelaksanaan | <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan dan implikasi sumber daya untuk Peminjam, dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti lingkup yang lebih luas mengenai usulan ESF (misalnya, standar tenaga kerja), kemampuan Peminjam yang berbeda dan pendekatan manajemen adaptif • Pengurangan beban dan biaya ekstra serta berbagai pilihan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan selagi menjaga efektivitas |
| | Pengembangan kemampuan klien dan dukungan pelaksanaan | <ul style="list-style-type: none"> • Pendanaan untuk pengembangan kemampuan klien • Pendekatan dan bidang-bidang fokus • Pendekatan terhadap pelaksanaan ESF dalam situasi yang memiliki keterbatasan kemampuan, misalnya FCS, negara-negara bagian yang kecil, dan situasi darurat |

| | | |
|--|-----------------|---|
| | Penyingkapan | <ul style="list-style-type: none">• Waktu persiapan dan penyingkapan dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial tertentu (berkaitan dengan ESS1 dan ESS10) |
| | Pelaksanaan ESF | <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan kemampuan internal Bank, penyediaan sumber daya, dan perubahan perilaku agar berhasil melaksanakan ESF• Cara-cara mencapai saling pengertian antara Peminjam dan Bank mengenai masalah yang sulit ditafsirkan |